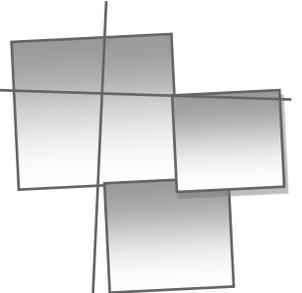




BKPSDM

RENJA TAHUN 2022



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KAB. KUTAI KARTANEGARA



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA**

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai III
Jln. Wolter Monginsidi Telp/Fax. (0541) 6666379 Kode Pos 75511

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN (PA)

NOMOR : B- 336.3 /BKPSDM/SET-3/SK/03/2021

TENTANG

**TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar tugas perencanaan kegiatan dan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara di perlukan adanya tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Panitia Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
- Mengingat :**
1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 121, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ;

16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 78) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEMBENTUK TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun anggaran 2022 pada dikum KESATU melaksanakan tugas Perencanaan Kegiatan BKPSDM tahun anggaran 2022

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun anggaran 2022 dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku secara berkala melaporkan hasil pelaksanaannya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 09 Maret 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai III
Jln. Walter Monginsidi Telp/Fax. (0541) 6666379 Kode Pos 75511

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN ANGGARAN 2022

- Pengarah** : H. Rakhmadi, S. Sos
Ketua : Mukhdan, SE
Anggota :
1. Drs. Iriansyah, M.Si
 2. Moh. Dahlan, SE., M.Si
 3. Drs. Ibnu Hamdiansyah, MM
 4. Theufiq Zulfian Noor, SPI
 5. Drs. Joko Sampurno, M.Si
 6. Kamalul Yakin
 7. Joko Widianto, S.Sos
 8. Nuryanti, S.Psi
 9. Heru Setiawan, SE
 10. Beni Siswanto, SE
 11. Rahma Handaya, S.Sos
 12. Dwi Nuryanto, SSTP
 13. Rokip, SSTP
 14. Harsiciptadie
 15. Acnad Solihin, S.Sos
 16. Mopfiyanto Ramadhan
 17. Muhd. Irfan Setiawan, SH
 18. Ronny Fatinasahrani, S.Sos

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 09 Maret 2021



H. RAKHMADI, S.Sos
RENCANA
NIP. 19680107 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 yang memuat Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka 1 tahun ke depan.

Rencana Kerja pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil, dengan memanfaatkan sebanyak banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif, dalam menyempurnakan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini.

Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan menyukseskan program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Program Dedikasi Kukar IDAMAN.

Tenggarong, 16 Juli 2021


Pit. KEPALA,
H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 19660107 200012 1 003

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|---|--------|
| Kata Pengantar | | i |
| Daftar Isi | | ii |
| Daftar Tabel | | iii |
| BAB I | PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 | Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 | Landasan Hukum | I-2 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan | I-3 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan | I-4 |
| BAB II | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU | II-6 |
| 2.1 | Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM | II-6 |
| 2.2 | Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM | II-22 |
| 2.3 | Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM | II-25 |
| 2.4 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra BKPSDM Tahun 2022 | II-25 |
| 2.5 | Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | II-32 |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM | III-33 |
| 3.1 | Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | III-33 |
| 3.2 | Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM | III-37 |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM | IV-39 |
| 4.1 | Program dan Kegiatan | IV-39 |
| BAB V | PENUTUP | V-46 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|--------|
| Tabel II.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2021 BKPSDM | II-14 |
| Tabel II.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM | II-23 |
| Tabel II.3 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 BKPSDM | II-26 |
| Tabel II.4 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 | II-32 |
| Tabel III.1 | Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 | III-38 |
| Tabel IV.1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2023 BKPSDM | IV-41 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dengan demikian daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2022 menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang

dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan sehingga tercapainya tujuan pelayanan publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 sekaligus dalam upaya pencapaian target sasaran program yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1,8201);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD
 13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan diatas, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen Renja Tahun 2022 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan prioritas program satu tahun dan digunakan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan.
- b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyamakan persepsi dan tercapainya komitmen bersama untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta memahami dan menilai arah kebijakan dan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terutama untuk mendukung terlaksananya percepatan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dengan Fokus Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu satu tahun (2022).

1.3.2 Tujuan :

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kurun waktu 1 tahun sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kurun waktu satu tahun (2022) dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
- c. Terciptanya keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas melalui penyusunan rencana kegiatan tahunan.
- d. Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 5 (lima) Bab terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum tentang penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, fungsi Renja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPd dan Renstra PD pada tahun 2022

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

4.1 Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini memuat hal-hal yang dianggap penting serta rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan Renja BKPSDM

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 9 (sembilan) program. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Realisasi program tahun anggaran 2020 :

1. Program Layanan Administrasi Perkantoran, realisasi kinerja program Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100%, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, target 300 surat dengan realisasi 99 surat (33,00%);
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, target 144 rekening dengan realisasi 127 rekening (88,19%);
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, target 16 kendaraan dengan realisasi 10 kendaraan (62,50%);
 - d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, target 1 paket dengan realisasi 1 paket (100%);
 - e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, target 3 paket dengan realisasi 3 paket (100,00%);
 - f. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, target 13.283 eksemplar dengan realisasi 13.283 eksemplar (100%);
 - g. Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, target 4.500 porsi dengan realisasi 3.719 porsi (82,64%)

- h. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah, target 190 orang/kali dengan realisasi 190 orang/kali (100%);
 - i. Kegiatan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran, target 264 orang/bulan dengan realisasi 252 orang/bulan (95,45%);
 - j. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, target 161 unit dengan realisasi 161 unit (100%);
 - k. Kegiatan Penataan Arsip Perangkat Daerah, target 1000 berkas dengan realisasi 1000 berkas (100%);
 - l. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Hari Besar/Nasional dan Pameran, target 1 kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan (100%);
 - m. Kegiatan Fasilitasi Manajemen Kepegawaian, target 10 fasilitasi dengan realisasi 10 fasilitasi (100%); dan
 - n. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga, target 4 paket dengan realisasi 4 paket (100%);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, realisasi kinerja program Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik sebesar 90% dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, target 4 paket dengan realisasi 3 paket (75%); dan
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, target 17 kendaraan dengan realisasi 14 kendaraan (82,35%)
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, realisasi kinerja program Jumlah Surat Teguran, target 1 Surat Teguran dengan realisasi 0 Surat Teguran.
- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, target 117 stel dengan realisasi 117 stel (100%)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi kinerja program Rata-rata nilai kinerja SKP sebesar 95,55% dengan kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Fasilitasi Tim Bekias, target 15 orang dengan realisasi 15 orang.
5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi kinerja Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset (99,00%) dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Serta Monev, target 10 dokumen dengan realisasi 10 dokumen (100,00%)
 - Kegiatan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah, target 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen (100,00%)
 - Kegiatan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, target 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen (100,00%)
6. Program Layanan Administrasi Kepegawaian dengan realisasi kinerja program :
- Persentase permohonan layanan mutasi yang selesai sesuai SOP (100,68%) dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Proses Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, target 3.500 PNS dengan realisasi 2.068 PNS (59,09%)
 - b. Kegiatan Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun, target 400 PNS dengan realisasi 489 PNS (122,25%)
 - c. Kegiatan Fasilitasi Layanan Mutasi Kepegawaian, target 500 berkas dengan realisasi 213 berkas (42,60%)
 - Persentase permohonan layanan fasilitasi profesi ASN yang selesai sesuai SOP (77,32%) dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Proses layanan Usul KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN bagi PNS dilingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara, target 500 ASN dengan realisasi 318 ASN (63,60%).
7. Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, dengan target :
- Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian mutakhir (100,78%) dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian Se-Kabupaten, target 2 laporan kegiatan dengan realisasi 2 laporan kegiatan (100%).
 - b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Kepegawaian, target 14.834 dokumen dengan realisasi 14.834 dokumen (100,00%);
 - c. Kegiatan Rekonsiliasi Peremajaan Data ASN Kab. Kutai Kartanegara, target 13.900 data dengan realisasi 11.006 data (79,18%).
 - d. Kegiatan Penyusunan Statistik Kepegawaian, target 60 buku dengan realisasi 60 buku (100,00%);

- e. Kegiatan Pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian Kab. Kutai Kartanegara, target 1 aplikasi dengan realisasi 1 aplikasi (100%).
 - f. Kegiatan Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara, target 12 laporan dengan realisasi 12 laporan (100,00%);
- Persentase Bezetting dalam Pengisian Formasi (101,76%), dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Analisis Kebutuhan Pegawai, target 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen (100%).
 - b. Kegiatan Grand Design Pengembangan Aparatur Kab. Kutai Kartanegara, target 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen (100%).
 - c. Kegiatan Seleksi Penerimaan ASN, target 150 orang dengan realisasi 87 orang (58,00%).
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kabupaten) dengan target :
- Persentase ASN yang mengikuti penjenjangan, teknis fungsional dan sertifikasi (101,63%) dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah, target 89 PNS dengan realisasi 61 PNS (68,54%)
 - b. Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, target 8 orang dengan realisasi 8 orang (100%);
 - c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah, target 517 peserta dengan realisasi 318 peserta (61,51%);
 - d. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat secara Mobile di Kecamatan, target 272 PNS dengan realisasi 254 PNS (93,38%);
 - e. Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu, target 5 orang dengan realisasi 5 orang (100,00%);
 - f. Kegiatan Diklat Teknis Pemerintahan (Camat), target 3 orang dengan realisasi 3 orang (100,00%)
- Tingkat pengembangan kompetensi ASN (50,51%) dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Analisis Kesenjangan Kompetensi ASN, target 3 dokumen dengan realisasi 3 dokumen (100%); dan

- b. Kegiatan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah PNS, target 250 peserta dengan realisasi 105 peserta (42,00%).
9. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan target :
- Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja di atas 76 (92,67%) dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Administrasi, target 7.639 ASN dengan realisasi 7.136 ASN (93,42%);
 - b. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Fungsional, target 7.052 ASN dengan realisasi 7.052 ASN (100%);
 - Persentase kasus pelanggaran disiplin kepegawaian yang diselesaikan (101,96%) dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Sumpah Janji PNS, target 100 peserta dengan realisasi 0 peserta (0,00%);
 - b. Kegiatan Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN, target 15 kasus dengan realisasi 15 kasus (100%);
 - c. Kegiatan Pengelolaan Absensi Elektronik dilingkungan Pemkab. Kukar, target 58 OPD dengan realisasi 55 OPD (94,83%)
 - Persentase perangkat daerah yang memiliki pola karier ASN (50%) dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karier dan Promosi, target 15 fasilitasi dengan realisasi 9 fasilitasi (60,00%);
 - b. Kegiatan Penyusunan Pengembangan Karier dan Promosi, target 5 OPD dengan realisasi 0 OPD (0,00%).

Analisis yang dapat disajikan atas pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu

a. Penilaian Kompetensi ASN

Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena :

- Penilaian Kompetensi ASN memiliki rangkaian kegiatan yang cukup panjang, dalam satu kegiatan melibatkan banyak orang dalam satu tempat, sehingga sangat beresiko menularkan covid-19.
- Belum adanya lembaga penilaian kompetensi yang mampu mengadakan penilaian kompetensi secara online penuh , sehingga

jika dilaksanakan sebagian besar harus bertatap muka dan memungkinkan penularan covid-19.

b. Penyelenggaraan Sumpah Janji PNS.

Kegiatan Penyelenggaraan Sumpah Janji PNS tidak bisa dilaksanakan karena :

- Jumlah PNS yang belum diambil sumpah/janjinya sebanyak 320 PNS dan tidak memungkinkan dilaksanakan dalam satu ruangan mengingat masih dalam masa pandemic Covid 19.
- Sumpah Janji PNS juga tidak bisa dilaksanakan secara virtual mengingat sebagian besar PNS yang belum diambil sumpah/janjinya adalah guru dan tenaga medis yang bertugas di pelosok yang belum memiliki fasilitas memadai untuk melakukan video conference.

c. Penyusunan Pengembangan Karier dan Promosi.

Kegiatan ini dijadwalkan pada triwulan IV tahun 2020 dan bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Tetapi kerjasama tersebut tidak berjalan optimal karena nara sumber dari LAN Makassar tidak bersedia menghadiri 4 agenda pertemuan karena masih dalam masa pandemi Covid 19 sehingga kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana yang telah disusun.

d. Terdapat 6 kegiatan yang realisasi keuangannya kurang dari 50% yaitu :

a. Fasilitasi Layanan Mutasi Kepegawaian

Realisasi kinerja kegiatan ini 42,60% dengan realisasi keuangan sebesar 34,46%, hal ini disebabkan proses pengembangan aplikasi SIAP ASN pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilaksanakan oleh pihak BKN pusat sehingga anggaran terkait pengembangan tidak dilaksanakan. Sesuai arahan dari pihak BKN Pusat, akan dilaksanakan integrasi data pegawaian, sehingga aplikasi SIAP ASN Kabupaten Kutai Kartanegara menunggu hasil koordinasi terkait layanan apa saja yang tidak difasilitasi oleh aplikasi dari BKN Pusat, dan kemudian menjadi dasar proses pengembangan layanan SIAP ASN tahun berikutnya.

b. Proses layanan Usul KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN bagi PNS dilingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara.

Realisasi kinerja kegiatan ini 63,60% dengan realisasi keuangan sebesar 40,86%, hal ini disebabkan selama masa pandemic Covid 19 di tahun

2020 volume permohonan layanan usul Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sekitar 50% dari rata-rata tahun sebelumnya. Sedangkan untuk biaya pengurusan layanan ke BKN Regional 8 Banjarmasin dan BKN Pusat mengalami penurunan karena berkas usul Karpeg, Karis dan Karsu dikirim melalui PT. Pos Indonesia sehingga terdapat efisiensi untuk belanja perjalanan dinas luar daerah.

c. Analisis Kebutuhan Pegawai

Realisasi kinerja kegiatan ini 100% dengan realisasi keuangan sebesar 26,62%, hal ini disebabkan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara elektronik / zoom meeting.

d. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

Realisasi kinerja kegiatan ini 61,51% dengan realisasi keuangan sebesar 28,18%, hal ini disebabkan Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja karena adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Surat Edaran Kepala LAN Nomor11/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus dalam Penyelenggaraan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Sosial Kultural sehingga banyak lembaga Diklat tidak dapat menyelenggarakan diklat dan BKPSDM tidak dapat memfasilitasi/mengirim peserta diklat.

e. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu

Realisasi kinerja kegiatan ini 100,00% dengan realisasi keuangan sebesar 14,28%. Pelaksanaan sertifikasi jabatan fungsional tertentu yang dijadwalkan di Jakarta dialihkan ke Samarinda mengingat adanya pandemi Covid 19, dan pihak penyelenggara tidak memungut biaya kontribusi mengakibatkan adanya penghematan pada Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Kontribusi

f. Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN

Realisasi kinerja kegiatan ini 100,00% dengan realisasi keuangan sebesar 35,77%. Kasus pelanggaran disiplin yang dilaporkan ke BKPSDM sebanyak 15 kasus, 13 kasus telah diselesaikan dengan jumlah rapat Tim

Pemeriksa (Ad Hoc) sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan 2 kasus pelanggaran Netralitas ASN masih menunggu rekomendasi dari KASN. Hingga akhir bulan Desember 2020 belum ada rekomendasi dari KASN, dari kegiatan ini target rapat Tim Pemeriksa (Ad Hoc) adalah sebanyak 5 kali sehingga masih ada 2 kali rapat yang belum dilaksanakan karena belum ada rekomendasi dari KASN terkait pelanggaran Netralitas ASN, hal ini menyebabkan pembayaran honorarium Tim Ad Hoc hanya dapat dibayar untuk 3 kali dari rencana 5 kali dan juga biaya konsumsi rapat hanya untuk 3 kali rapat.

Untuk lebih jelasnya disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 pada tabel II-1 sebagai berikut:

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | 87 kendaraan | 45 kendaraan | 16 kendaraan | 10 kendaraan | 63% | 16 kendaraan | 71 kendaraan | 82% |
| | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah jasa administrasi keuangan | 1596 orang | 1016 orang | 0 orang | orang | 0% | 0 orang | 1016 orang | 64% |
| | | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara | 842 unit | 520 unit | 161 unit | 161 unit | 100% | 140 unit | 821 unit | 98% |
| | | | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor | 6 paket | 4 paket | 1 paket | 1 paket | 100% | 1 paket | 6 paket | 100% |
| | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 19 paket | 13 paket | 3 paket | 3 paket | 100% | 3 paket | 19 paket | 100% |
| | | | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga | 13 paket | 9 paket | 4 paket | 4 paket | 100% | 0 paket | 13 paket | 100% |
| | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1. Jumlah Bahan Bacaan 2. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan | 31595 eksemplar | 21221 eksemplar | 13283 eksemplar | 13283 eksemplar | 100% | 1277 eksemplar | 35781 eksemplar | 113% |
| | | | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makanan dan Minuman | 6 paket | 6 paket | 0 paket | paket | 0% | paket | 6 paket | 100% |
| | | | | Jumlah Makanan dan Minuman | 12975 porsi | 3975 porsi | 4500 porsi | 3719 porsi | 83% | 4500 porsi | 12194 porsi | 94% |
| | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah | Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi | 1276 orang/kali | 864 orang/kali | 190 orang/kali | 190 orang/kali | 100% | 100 orang/kali | 1154 orang/kali | 90% |
| | | | Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran | Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran | 1680 orang | 1111 orang | 264 orang | 252 orang | 95% | 276 orang | 1639 orang | 98% |
| | | | Sertifikasi ISO 9001:2008 | Jumlah sertifikasi | 0 sertifikasi | 0 sertifikasi | 0 sertifikasi | 0 sertifikasi | 0% | 0 sertifikasi | 0 sertifikasi | 0% |
| | | | Mengikuti Pameran Sangasanga dan Erau Kutai Kartanegara | Jumlah pameran yang diikuti | 0 pameran | 0 pameran | 0 pameran | 0 pameran | 0% | 0 pameran | 0 pameran | 0% |
| | | | Fasilitasi kegiatan hari besar/nasional dan pameran | Jumlah kegiatan hari besar/nasional dan pameran | 6 kegiatan | 2 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 0 kegiatan | 3 kegiatan | 50% |
| | | | Fasilitasi manajemen kepegawaian | Jumlah fasilitasi | 30 laporan | 10 laporan | 10 laporan | 10 laporan | 100% | 10 laporan | 30 laporan | 100% |
| | | | Penataan Arsip Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | 2000 dokumen | 0 dokumen | 1000 dokumen | 1000 dokumen | 100% | 450 dokumen | 1450 dokumen | 73% |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 90 Persen | 113% | Persen | 80 Persen | 80% |
| | | | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Jumlah pengadaan kendaraan | 0 unit | 0 unit | 0 unit | unit | 0% | 0 unit | 0 unit | 0% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------|------------------------|------|
| | | | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | 0 paket | 0 paket | 0 paket | 0 paket | 0% | 0 paket | 0 paket | 0% |
| | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | 2 paket | 4 paket | 0 paket | 0 paket | 0% | 1 paket | 5 paket | 250% |
| | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | 2 paket | 2 paket | 4 paket | 3 paket | 75% | 1 paket | 6 paket | 300% |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | 51 kendaraan | 27 kendaraan | 17 kendaraan | 14 kendaraan | 82% | 16 kendaraan | 57 kendaraan | 112% |
| | | | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | Jumlah unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 0% | unit | 0 unit | 0% |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Pegawai | Jumlah Surat Teguran | 1 Surat Teguran | 1 Surat Teguran | 1 Surat Teguran | 0 Surat Teguran | 0% | Surat Teguran | 1 Surat Teguran | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 128 stel | 0 stel | 117 stel | 117 stel | 100% | 0 stel | 117 stel | 91% |
| | | | Pengadaan Pakaian Korpri | Jumlah pakaian KORPRI | 0 stel | 0 stel | 0 stel | stel | 0% | 0 stel | 0 stel | 0% |
| | | | Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian Khusus hari-hari tertentu | 0 stel | 0 stel | 0 stel | stel | 0% | 0 stel | 0 stel | 0% |
| | | | Pengadaan Mesin Absensi Online | Jumlah mesin Absensi online | 0 unit | 0 unit | 0 unit | unit | 0% | 0 unit | 0 unit | 0% |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rata - rata nilai kinerja SKP | 85,84 Nilai | Nilai | 85,8 Nilai | 82 Nilai | 96% | Nilai | Nilai | |
| | | | Peningkatan kompetensi ASN BKPSDM | Jumlah peserta | 153 Orang | 0 Orang | 0 Orang | Orang | 0% | 0 Orang | 0 Orang | 0% |
| | | | Peningkatan kompetensi ASN BKPPD | Jumlah peserta | 87 Orang | 87 Orang | 0 Orang | Orang | 0% | 0 Orang | 87 Orang | 100% |
| | | | Peningkatan kompetensi ASN BKD | Jumlah peserta | 24 Orang | 24 Orang | 0 Orang | Orang | 0% | 0 Orang | 24 Orang | 100% |
| | | | Fasilitasi Tim Bekias BKPSDM | Jumlah fasilitasi | 45;3 Orang;Dokumen | 30;2 Orang;Dokumen | 15;1 Orang;Dokumen | 15;1 Orang;Dokumen | 100% | 50 Orang;Dokumen | 95;3 Orang;Dokumen | 67% |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja | 100 Persen | 100 Persen | 100,00 Persen | 100,00 Persen | | Persen | 100 Persen | |
| | | | Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Serta Monev | Jumlah dokumen | 32 Dokumen | 14 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100% | 18 Dokumen | 42 Dokumen | 131% |
| | | | Penyusunan dokumen Renstra | Jumlah dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 Dokumen | Dokumen | 0% | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | | Revisi Renstra | Jumlah dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 Dokumen | Dokumen | 0% | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

| | | | | Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Persen | | Persen | 100 Persen | | |
|--|--|--|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|------|
| | | | | Penyusunan laporan Keuangan | Jumlah laporan | 0 Laporan | 0 Laporan | 0 Laporan | Laporan | 0% | 0 Laporan | 0 Laporan | 0% |
| | | | | Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah laporan | 2 Laporan | 0 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 13 Laporan | 14 Laporan | 700% |
| | | | | Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan | 2 Laporan | 0 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 2 Laporan | 100% |
| | | | | Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga | Jumlah dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 Dokumen | Dokumen | 0% | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 1. Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja di atas 76 | 95 Persen | 86 Persen | 90 Persen | 83,4 Persen | 93% | Persen | 86 Persen | |
| | | | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Administrasi | Jumlah Dokumen / PNS | 22918 dokumen | 7640 dokumen | 7639 dokumen | 7136 dokumen | 93% | 2 dokumen | 14778 dokumen | 64% |
| | | | | Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja berbasis Web | Jumlah Server dan dokumen | 1 Server dan dokumen | 1 Server dan dokumen | 0 Server dan dokumen | Server dan dokumen | 0% | Server dan dokumen | 1 Server dan dokumen | 100% |
| | | | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Fungsional | Jumlah Dokumen / PNS | 21300 dokumen | 7196 dokumen | 7052 dokumen | 7052 dokumen | 100% | 6980 dokumen | 21228 dokumen | 100% |
| | | | | Penyelenggaraan Sumpah janji PNS | Jumlah peserta | 900 orang | 600 orang | 100 orang | orang | 0% | orang | 600 orang | 67% |
| | | | | Revisi Perbup | Jumlah dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 dokumen | dokumen | 0% | dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | | | Pembuatan Aplikasi Laporan Kerja Berbasis Android | Jumlah Aplikasi | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 0 Aplikasi | Aplikasi | 0% | Aplikasi | 1 Aplikasi | 100% |
| | | | | Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi | Jumlah PNS | 110 orang | 10 orang | 0 orang | orang | 0% | orang | 10 orang | 9% |
| | | | | Penyusunan Pedoman Integrasi Aplikasi antara LHK, SKP dan rencana tahunan | Jumlah Dokumen/Aplikasi | 0 dokumen/aplikasi | 0 dokumen/aplikasi | 0 dokumen/aplikasi | dokumen/aplikasi | 0% | dokumen/aplikasi | 0 dokumen/aplikasi | 0% |
| | | | | Pendampingan dan Penyusunan Standar Teknis Sasaran Kerja Pegawai | Jumlah dokumen | 0 dokumen/berkas | 0 dokumen/berkas | 0 dokumen/berkas | dokumen/berkas | 0% | dokumen/berkas | 0 dokumen/berkas | 0% |
| | | | | Sosialisasi Ketentuan tentang Kode Etik dan Disiplin ASN | Jumlah peserta | 0 peraturan | 0 peraturan | 0 peraturan | peraturan | 0% | peraturan | 0 peraturan | 0% |
| | | | | | 2. Persentase kasus pelanggaran disiplin kepegawaian yang diselesaikan | 90 Persen | 80 Persen | 80 Persen | Persen | | Persen | 80 Persen | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|----------------------|------|
| | | | Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Kasus pelanggaran yang ditangani | 100 kasus | 45 kasus | 35 kasus | 15 kasus | 43% | 20 kasus | 80 kasus | 80% |
| | | | Pengelolaan Absensi Elektronik dilingkungan Pemkab Kukar | Jumlah laporan absensi elektronik (online 5 dan offline 53) | 174 laporan | 50 laporan | 58 laporan | 55 laporan | 95% | 58 laporan | 163 laporan | 94% |
| | | | Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Kode Etik ASN | Jumlah kasus | 170 kasus | 170 kasus | 0 kasus | kasus | 0% | kasus | 170 kasus | 100% |
| | | | | 3. Persentase perangkat daerah yang memiliki pola karier ASN | 75 Persen | 25 Persen | 25 Persen | Persen | | Persen | 25 Persen | |
| | | | Penempatan PNS dalam jabatan Struktural dan Fungsional | Jumlah PNS | 1250 PNS | 1250 PNS | 0 PNS | PNS | 0% | PNS | 1250 PNS | 100% |
| | | | Fasilitasi Pengembangan Karier dan Promosi | Jumlah Fasilitasi | 45 laporan rapat TPK | 15 laporan rapat TPK | 15 laporan rapat TPK | 9 laporan rapat TPK | 60% | 15 laporan rapat TPK | 39 laporan rapat TPK | 87% |
| | | | Penempatan PNS | Jumlah PNS | 0 PNS | 0 PNS | 0 PNS | PNS | 0% | PNS | 0 PNS | 0% |
| | | | Pembangunan Sistem Pengembangan Karier dan Promosi | Jumlah Aplikasi | 0 aplikasi | 0 aplikasi | 0 aplikasi | aplikasi | 0% | aplikasi | 0 aplikasi | 0% |
| | | | Penyusunan Pengembangan Karier dan Promosi | Jumlah Dokumen | 15 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | 0 dokumen | 0% | dokumen | 5 dokumen | 33% |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1. Persentase ASN yang mengikuti penjenjangan, teknis fungsional dan sertifikasi | 75 Persen | 65 Persen | 65 Persen | Persen | | Persen | 65 Persen | |
| | | | Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah | Jumlah peserta | 506 orang | 506 orang | 0 orang | orang | 0% | orang | 506 orang | 100% |
| | | | Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah | Jumlah peserta | 309 orang | 101 orang | 100 orang | 61 orang | 61% | 128 orang | 290 orang | 94% |
| | | | Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas | Jumlah peserta | 89 orang | 55 orang | 8 orang | 8 orang | 100% | 12 orang | 75 orang | 84% |
| | | | Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah | Jumlah peserta | 1900 peserta | 871 peserta | 663 peserta | 318 peserta | 48% | 200 peserta | 1389 peserta | 73% |
| | | | Pendidikan dan pelatihan teknis bagi PNS Daerah | Jumlah peserta | 0 orang | 0 orang | 0 orang | orang | 0% | orang | 0 orang | 0% |
| | | | Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah | Jumlah peserta | 0 orang | 0 orang | 0 orang | orang | 0% | orang | 0 orang | 0% |
| | | | Diklat Bendaharawan | Jumlah peserta | 40 peserta | 40 peserta | 0 peserta | peserta | 0% | peserta | 40 peserta | 100% |
| | | | Diklat Teknis Perpajakan | Jumlah peserta | 0 peserta | 0 peserta | 0 peserta | peserta | 0% | peserta | 0 peserta | 0% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|------|----------------|------------------|------|
| | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat secara Mobile di Kecamatan | Jumlah peserta | 200 peserta | 0 peserta | 100 peserta | 254 peserta | 254% | peserta | 254 peserta | 127% |
| | | | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu | Jumlah peserta | 10 peserta | 0 peserta | 5 peserta | 5 peserta | 0 | peserta | 5 peserta | 50% |
| | | | Diklat Teknis Pemerintahan (Camat) | Jumlah peserta | 10 peserta | 0 peserta | 5 peserta | 3 peserta | 0 | 40 peserta | 43 peserta | 430% |
| | | | Analisis Kebutuhan Diklat | Jumlah Dokumen | 1 dokumen/berkas | 1 dokumen/berkas | 0 dokumen/berkas | dokumen/berkas | 0% | dokumen/berkas | 1 dokumen/berkas | 100% |
| | | | | 2. Tingkat pengembangan kompetensi ASN | 54 persen | 23 | 23 | | | | 23 | |
| | | | Penilaian Kompetensi ASN | Jumlah ASN | 610 orang | 169 orang | 200 orang | 0 orang | 0% | 80 orang | 249 orang | 41% |
| | | | Analisis Kesenjangan Kompetensi ASN | Jumlah dokumen | 3 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 3 dokumen | 300% | dokumen | 4 dokumen | 133% |
| | | | Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah PNS | Jumlah peserta | 540 orang | 180 orang | 180 orang | 105 orang | 58% | 180 orang | 465 orang | 86% |
| | | | Penilaian Kompetensi PNS/ Pejabat Struktural | Jumlah PNS | 88 orang | 88 orang | 0 orang | orang | 0% | orang | 88 orang | 100% |
| | | | Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur | Jumlah peserta | 0 orang | 0 orang | 0 orang | orang | 0% | orang | 0 orang | 0% |
| | | | Fit and Propertest Calon Pejabat Struktural (Seleksi Terbuka) | Jumlah peserta | 0 orang | 0 orang | 0 orang | orang | 0% | orang | 0 orang | 0% |
| | | | Fit and Propertest Calon Pejabat Struktural Esselon II | Jumlah peserta | 0 orang | 0 orang | 0 orang | orang | 0% | orang | 0 orang | 0% |
| | | | Penilaian Kompetensi PNS | Jumlah PNS yang mengikuti Kompetensi | 0 orang | 0 orang | 0 orang | orang | 0% | orang | 0 orang | 0% |
| | | | Penilaian Kompetensi ASN Melalui CAT BKD | Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi | 0 sesi | 0 sesi | 0 sesi | sesi | 0% | sesi | 0 sesi | 0% |
| | | | Penilaian Kompetensi Calon Pejabat Struktural | Jumlah PNS yang mengikuti kompetensi calon pejabat struktural | 55 orang | 55 orang | 0 orang | orang | 0% | orang | 55 orang | 100% |
| | | | Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian | 1. Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian mutakhir | 100 Persen | 90 Persen | 90 Persen | Persen | | Persen | 90 Persen | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------|---------------|-------------------|------|
| | | | Rapat Koordinasi Kepegawaian Se-Kabupaten | Jumlah laporan rakor kepegawaian | 6 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 100% | 1 laporan | 5 laporan | 83% |
| | | | Pengelolaan Arsip Kepegawaian | Jumlah arsip kepegawaian ASN | 30168 dokumen | 500 dokumen | 14834 dokumen | 14834 dokumen | 100% | 1 bundel | 153 bundel | 51% |
| | | | Penyusunan Statistik Kepegawaian | Jumlah buku | 120 buku | 0 buku | 60 buku | 60 buku | 100% | 1 buku | 60 dokumen | 50% |
| | | | Updating data Kepegawaian | Jumlah dokumen PNS | 16601 dokumen PNS | 16601 dokumen PNS | 0 dokumen PNS | 0 dokumen PNS | 0% | 0 dokumen PNS | 16601 dokumen PNS | 100% |
| | | | Rekonsiliasi Peremajaan Data ASN Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah data | 47182 Data | 19382 Data | 13900 Data | 11006 Data | 79% | 6000 Data | 36388 Data | 77% |
| | | | Pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah aplikasi | 1 aplikasi | 0 aplikasi | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 100% | 1 aplikasi | 2 aplikasi | 200% |
| | | | Grand design pengembangan aparatur Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 dokumen | 0 dokumen | 0% | 0 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | | Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai kartanegara | Jumlah laporan pengelolaan website | 24 laporan | 0 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 1 laporan | 12 website | 50% |
| | | | | 2. Persentase Bezetting Dalam Pengisian Formasi | 95 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Persen | | Persen | 85 Persen | |
| | | | Analisis Kebutuhan Pegawai | Jumlah dokumen kebutuhan pegawai | 7 dokumen | 5 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 7 dokumen | 100% |
| | | | Analisis Penataan Pegawai | Jumlah dokumen penataan pegawai | 4 dokumen | 4 dokumen | 0 dokumen | 0 dokumen | 0% | 0 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| | | | Seleksi Penerimaan ASN | Jumlah formasi yang tersedia | 300 orang | 0 orang | 95 orang | 87 orang | 92% | 150 orang | 237 orang | 79% |
| | | | Program Layanan Administrasi Kepegawaian | 1. Persentase permohonan layanan mutasi yang selesai sesuai SOP | 85 Persen | 75 Persen | 75 Persen | Persen | | Persen | 75 Persen | |
| | | | Proses Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS | Jumlah Administrasi Kenaikan Pangkat PNS | 18574 SK | 10926 PNS | 3500 PNS | 2068 PNS | 59% | 2500 PNS | 15494 PNS | 83% |
| | | | Fasilitasi Layanan Mutasi Kepegawaian | Jumlah Fasilitasi Layanan Mutasi | 600 dokumen | 200 dokumen | 200 dokumen | 213 dokumen | 107% | 100 dokumen | 513 dokumen | 86% |
| | | | Pemberkasan dan Usul Penetapan Pegawai | Jumlah CPNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------|------------------|------------------|---------------|------|---------------|------------------|------|
| | | | Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun | Jumlah SK Pensiun PNS, SK MPP dan SK Pemberhentian dari Jabatan / PNS | 2147 SK | 1320 SK | 393 SK | 489 SK | 124% | 429 SK | 2238 SK | 104% |
| | | | | 2. Persentase permohonan layanan fasilitasi profesi ASN yang selesai sesuai SOP | 95 Persen | 80 Persen | 80 Persen | Persen | | Persen | 80 Persen | |
| | | | Proses layanan Usul KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN bagi PNS dilingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara | Jumlah administrasi Karpeg/Karis/Karsu/Taspen/KPE | 2900 dokumen | 1719 dokumen | 500 dokumen | 318 dokumen | 64% | 250 dokumen | 2287 dokumen | 79% |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Terbentuknya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut BKPSDM), Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 atas Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lebih lanjut penjelasan mengenai tugas dan fungsi BKPSDM diuraikan bahwa BKPSDM melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara.

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah.
2. Meningkatnya Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Target sasaran pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel II.2 berikut:

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKPSDM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

| No | Indikator*) | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra-PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|--|---|----------------------|-----|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM setingkat Impact | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | | BB (75) | A (85) | | | BB(75,89) | | A (80) | A (82) | |
| 2. | Indeks Profesionalitas ASN | | | 75 | 80 | | | 40,25 | | 61 | 65 | |
| 3. | Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM | | | B (80) | A (85) | A (85) | A (85) | BB(76,62) | | A (85) | A (86) | |
| Indikator Kinerja Program setingkat Outcome | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| 2 | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | | 80 | 80 | |
| 3 | Jumlah Surat Teguran | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | |
| 4 | Rata - rata nilai kinerja SKP | | | 85,82 | 85,84 | 85,84 | 85,84 | 82 | | 85,84 | 85,84 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|-----|--|
| 5 | Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| 6 | Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | | 100 | 100 | |
| 7 | Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja di atas 76 (%) | | | 90 | 95 | 95 | 95 | 83,40 | | 95 | 95 | |
| 8 | Persentase kasus pelanggaran disiplin kepegawaian yang diselesaikan (%) | | | 85 | 90 | 90 | 90 | 86,67 | | 90 | 90 | |
| 9 | Persentase perangkat daerah yang memiliki pola karier ASN (%) | | | 50 | 75 | 75 | 75 | 25 | | 75 | 75 | |
| 10 | Persentase ASN yang mengikuti penjurangan, teknis fungsional dan sertifikasi (%) | | | 70 | 75 | 75 | 75 | 71,14 | | 75 | 75 | |
| 11 | Tingkat pengembangan kompetensi ASN (%) | | | 39 | 54 | 54 | 54 | 19,7 | | 54 | 54 | |
| 12 | Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian mutakhir (%) | | | 95 | 100 | 100 | 100 | 95,74 | | 100 | 100 | |
| 13 | Persentase Bezetting Dalam Pengisian Formasi (%) | | | 90 | 95 | 95 | 95 | 91,58 | | 95 | 95 | |
| 14 | Persentase permohonan layanan mutasi yang selesai sesuai SOP (%) | | | 80 | 85 | 85 | 85 | 80,54 | | 85 | 85 | |
| 15 | Persentase permohonan layanan fasilitasi profesi ASN yang selesai sesuai SOP (%) | | | 85 | 95 | 95 | 95 | 65,72 | | 95 | 95 | |

2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis bidang kepegawaian yaitu:

- a. Optimalisasi pengelolaan informasi kepegawaian;
- b. Penataan ASN sesuai dengan formasi;
- c. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan;
- d. Pelaksanaan mutasi, promosi dan pengembangan karier sesuai dengan pola karier dan formasi PNS;
- e. Optimalisasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi aparatur;
- f. Teridentifikasinya kesenjangan kompetensi aparatur;
- g. Optimalisasi penegakan disiplin, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; dan
- h. Peningkatan tata kelola dan kinerja BKPSDM.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra BKPSDM Tahun 2022

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BKPSDM dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKPSDM dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan setiap perangkat daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Sebagaimana Tabel II.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah ini :

Tabel II-3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| No | Rancangan Awal RKPd/Renstra PD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------------|---|-------------------|--------------------------|---|------------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN | | | | | UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN | | | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 85 Nilai | 13.022.779.060,00 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 85 Nilai | 13.622.806.535,39 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18 dokumen | 95.000.000,00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 23 dokumen | 145.000.000,00 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 dokumen | 50.000.000,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 dokumen | 50.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 dokumen | 45.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 dokumen | 45.000.000,00 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 dokumen | 0,00 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 dokumen | 50.000.000,00 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel | 15 laporan | 10.343.500.000,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel | 15 laporan | 10.544.641.295,00 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan | 1080 orang/bulan | 10.090.000.000,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan | 1080 ASN/bulan | 10.344.641.295,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 50.000.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 50.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--|----------------|------------------|---|------------------------|--|----------------|------------------|--|
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 laporan | 203.500.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 laporan | 150.000.000,00 | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah | 1 laporan | 45.000.000,00 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah | 2 laporan | 45.000.000,00 | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi | 1 laporan | 45.000.000,00 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi | 2 laporan | 45.000.000,00 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian | 1 dokumen | 75.000.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian | 2 dokumen | 50.000.000,00 | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 50 Orang | 75.000.000,00 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 50 Orang | 50.000.000,00 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 Layanan | 1.055.000.000,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 Layanan | 1.055.000.000,00 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 paket | 150.000.000,00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 37 jenis | 150.000.000,00 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 4500 porsi | 150.000.000,00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 4500 porsi | 150.000.000,00 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 3 paket | 200.000.000,00 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 317439 lembar | 200.000.000,00 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan | 1277 exemplar | 15.000.000,00 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan | 1277 exemplar | 15.000.000,00 | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi | 10 fasilitas | 125.000.000,00 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi | 5 Orang/kali | 125.000.000,00 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 100 perjalanan | 315.000.000,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 100 Orang/kali | 315.000.000,00 | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada Unit Kearsipan (UK) | 450 dokumen | 100.000.000,00 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada Unit Kearsipan (UK) | 450 dokumen | 100.000.000,00 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 387.750.000,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 387.750.000,00 | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan | 1 paket | 287.750.000,00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan | 1 paket | 287.750.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---|--------------|------------------|---|------------------------|---|------------|------------------|--|
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan | 1 paket | 100.000.000,00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan | 1 paket | 100.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | 12 bulan | 696.529.060,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | 12 bulan | 1.095.415.240,00 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Surat Menyurat | 300 surat | 22.000.000,00 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Surat Menyurat | 12 bulan | 22.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 132 rekening | 146.000.000,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | 146.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 140 unit | 100.000.000,00 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 bulan | 100.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Kutai Kartanegara | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS | 276 THL | 428.529.060,00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Kutai Kartanegara | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS | 12 Bulan | 827.415.240,00 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Barang Milik Daerah | 16 unit | 325.000.000,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Barang Milik Daerah | 12 unit | 300.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak | 16 unit | 325.000.000,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak | 12 unit | 300.000.000,00 | |
| | Program Kepegawaian Daerah | | 1. Persentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi | 100 Persen | 4.825.000.000,00 | Program Kepegawaian Daerah | | 1. Persentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi | 100 Persen | 3.640.000.000,00 | |
| | | | 2. Persentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi | 100 Persen | | | | 2. Persentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi | 100 Persen | | |
| | | | 3. Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi yang terisi | 60 Persen | | | | 3. Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi yang terisi | 60 Persen | | |
| | | | 4. Rasio pegawai fungsional | 50 Persen | | | | 4. Rasio pegawai fungsional | 50 Persen | | |
| | | | 5. Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar | 34 Persen | | | | 5. Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar | 34 Persen | | |
| | | | 6. Persentase Bezetting dalam pengisian formasi | 95 Persen | | | | 6. Persentase Bezetting dalam pengisian formasi | 95 Persen | | |
| | | | 7. Persentase layanan administrasi pemberhentian ASN dan fasilitasi profesi ASN yang selesai sesuai SOP | 95 Persen | | | | 7. Persentase layanan administrasi pemberhentian ASN dan fasilitasi profesi ASN yang selesai sesuai SOP | 95 Persen | | |
| | | | 8. Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian mutakhir | 95 Persen | | | | 8. Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian mutakhir | 95 Persen | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|-------|----------|------------------|--|------------------------|--|-----------|-----------------------|------------------|--|
| | | | 9. Persentase layanan Mutasi dan Promosi yang selesai sesuai SOP | 85 | Persen | | | | 9. Persentase layanan Mutasi dan Promosi yang selesai sesuai SOP | 85 | Persen | | |
| | | | 10. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi | 13,23 | Persen | | | | 10. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi | 13,23 | Persen | | |
| | | | 11. Persentase Tingkat capaian kinerja PNS di atas 76 | 95 | Persen | | | | 11. Persentase Tingkat capaian kinerja PNS di atas 76 | 95 | Persen | | |
| | | | 12. Persentase Pelanggaran Disiplin PNS yang diselesaikan | 90 | Persen | | | | 12. Persentase Pelanggaran Disiplin PNS yang diselesaikan | 90 | Persen | | |
| | | | 13. Persentase Layanan Tanda Jasa dan Izin Perceraian yang selesai | 80 | Persen | | | | 13. Persentase Layanan Tanda Jasa dan Izin Perceraian yang selesai | 80 | Persen | | |
| | | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | 1.300.000.000,00 | | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | 1.425.000.000,00 | |
| | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah dokumen Kebutuhan ASN yang disusun | 1 | dokumen | 100.000.000,00 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah dokumen Kebutuhan ASN yang disusun | 1 | dokumen | 75.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Formasi ASN | 276 | formasi | 500.000.000,00 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Formasi ASN | 276 | formasi | 450.000.000,00 | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah SK Pensiun dan SK Pemberhentian ASN | 337 | SK | 150.000.000,00 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah SK Pensiun dan SK Pemberhentian ASN | 500 | SK | 100.000.000,00 | |
| | Fasilitasi lembaga profesi ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Layanan Profesi ASN Jumlah Laporan | 1560 | layanan | 150.000.000,00 | Fasilitasi lembaga profesi ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah Layanan Profesi ASN Jumlah Laporan | 1142 2 | fasilitasi laporan | 500.000.000,00 | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah pengembangan aplikasi SIMPEG Jumlah laporan | 1 | Aplikasi | 150.000.000,00 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah pengembangan aplikasi SIMPEG Jumlah laporan | 1 0 | Aplikasi laporan | 100.000.000,00 | |
| | Pengelolaan data Kepegawaian | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah data kepegawaian yang diupdate | 2972 | data | 150.000.000,00 | Pengelolaan data Kepegawaian | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah data kepegawaian yang diupdate | 2972 | data | 100.000.000,00 | |
| | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah dokumen evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 | dokumen | 100.000.000,00 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah dokumen evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 | dokumen | 100.000.000,00 | |
| | | | Mutasi dan Promosi ASN | | | 600.000.000,00 | | | Mutasi dan Promosi ASN | | | 600.000.000,00 | |
| | Pengelolaan Mutasi ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah layanan mutasi ASN | 316 | layanan | 150.000.000,00 | Pengelolaan Mutasi ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah layanan mutasi ASN | 460 | fasilitasi | 200.000.000,00 | |
| | Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah layanan kenaikan pangkat ASN | 2150 | layanan | 250.000.000,00 | Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah layanan kenaikan pangkat ASN | 2150 | SK | 200.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|---------------|------------------|--|------------------------|---|---------------|------------------|--|
| | Pengelolaan promosi ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah rapat promosi ASN | 15 fasilitasi | 200.000.000,00 | Pengelolaan promosi ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah rapat promosi ASN | 15 rapat | 200.000.000,00 | |
| | Pengembangan kompetensi ASN | | Cakupan Layanan Pengembangan Kompetensi ASN | 100 Persen | 2.000.000.000,00 | Pengembangan kompetensi ASN | | Cakupan Layanan Pengembangan Kompetensi ASN | 100 Persen | 1.075.000.000,00 | |
| | Peningkatan kapasitas kinerja ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah peserta yang mengikuti UD dan PI | 100 peserta | 300.000.000,00 | Peningkatan kapasitas kinerja ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah peserta yang mengikuti UD dan PI | 380 peserta | 350.000.000,00 | |
| | Pengelolaan Assesment Center | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah peserta yang mengikuti assesment/ujian | 200 peserta | 800.000.000,00 | Pengelolaan Assesment Center | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah peserta yang mengikuti assesment/ujian | 80 peserta | 350.000.000,00 | |
| | Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah ASN yang mendapatkan tugas belajar dan izin belajar | 447 ASN | 900.000.000,00 | Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah ASN yang mendapatkan tugas belajar dan izin belajar | 100 ASN | 375.000.000,00 | |
| | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | Cakupan Layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 100 Persen | 925.000.000,00 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | Cakupan Layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 100 Persen | 540.000.000,00 | |
| | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah dokumen | 1 dokumen | 150.000.000,00 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah dokumen | 1 dokumen | 100.000.000,00 | |
| | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah dokumen | 12377 dokumen | 275.000.000,00 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah dokumen | 12377 dokumen | 125.000.000,00 | |
| | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah dokumen Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 dokumen | 125.000.000,00 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah dokumen Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 dokumen | 75.000.000,00 | |
| | Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan | 15 kasus | 150.000.000,00 | Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan | 15 kasus | 100.000.000,00 | |
| | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah PNS penerima Tanda Jasa | 348 PNS | 150.000.000,00 | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah PNS penerima Tanda Jasa | 348 PNS | 90.000.000,00 | |
| | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah permohonan izin perceraian pegawai yang diselesaikan | 35 surat | 75.000.000,00 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah permohonan izin perceraian pegawai yang diselesaikan | 35 surat | 50.000.000,00 | |
| | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | | 1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 8,55 jam | 5.750.000.000,00 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | | 1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 8,55 jam | 2.720.000.000,00 | |
| | | | 2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 10,23 Persen | | | | 2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 10,23 Persen | | |
| | | | 3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 66,85 Persen | | | | 3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 66,85 Persen | | |
| | | | 4. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi | 81,85 Persen | | | | 4. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi | 81,85 Persen | | |

| | | | 5. Persentase ASN yang mengikuti diklat prajabatan | 100 Persen | | | | 5. Persentase ASN yang mengikuti diklat prajabatan | 100 Persen | | |
|--|---|------------------------|---|--------------|--------------------------|---|------------------------|---|-------------|--------------------------|--|
| | Pengembangan kompetensi Teknis | | Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis | 1160 ASN | 2.000.000.000,00 | Pengembangan kompetensi Teknis | | Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis | 210 ASN | 420.000.000,00 | |
| | Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah peserta | 1160 peserta | 2.000.000.000,00 | Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah peserta | 210 peserta | 420.000.000,00 | |
| | Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional | | Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan Jumlah ASN yang mengikuti diklat prajabatan | 200 ASN | 3.750.000.000,00 | Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional | | Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan Jumlah ASN yang mengikuti diklat prajabatan | 120 ASN | 2.300.000.000,00 | |
| | Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah peserta | 200 peserta | 3.750.000.000,00 | Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan | Kab. Kutai Kartanegara | Jumlah peserta | 120 peserta | 2.300.000.000,00 | |
| | JUMLAH | | | | 23.597.779.060,00 | | | | | 19.982.806.535,00 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2022, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga tidak mengakomodir usulan program dan kegiatan masyarakat.

Tabel II-4

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Kutai Kartanegara**

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | Tidak ada |
| | | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Secara spesifik program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2021-2026, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana Strategis kementerian/kelembagaan.

Telaahan strategis berdasarkan Rencana Strategis terhadap 4 (empat) kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

A. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina Aparatur Sipil Negara Kementerian PAN-RB memiliki visi **“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan**

Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong” dan misi “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu:

- a. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik - *digital bureaucracy*;
- b. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global;
- c. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
- d. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
- e. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani;
- f. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan strategi ini dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN;
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis;
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja; dan
- d. Transformasi pelayanan publik.

Paparan diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kukar, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara.

B. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

Badan Kepegawaian Negara (BKN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah **“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”**

untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, netral dan sejahtera. Visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) misi, yaitu:

- a. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
- b. Penyelenggaraan manajemen ASN;
- c. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
- d. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN; dan
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya mempedomani Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021-2026 dalam hal kebijakan pembangunan di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, melalui peningkatan profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur;
- b. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur.

Gambaran diatas memberikan arah dalam dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis, merupakan penjabaran dan tindaklanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara dan program peningkatan kesejahteraan aparatur.

C. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;

Lembaga Administrasi Negara (LAN), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil. Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah **“Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class**

Government Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

- a. Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional;
- b. Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analisis kebijakan yang kompeten;
- c. Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi;
- d. Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan peningkatan program pendidikan kedinasan Aparatur Sipil Negara dan program pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kukar, mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

D. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang merupakan salah satu unit organisasi dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki visi **“Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang Kompeten dan Profesional”** yang dicapai melalui 3 (tiga) misi yaitu:

- a. Meningkatkan Standar Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. Menyelenggarakan Sertifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;
- c. Mengembangkan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.

Berdasarkan telaahan lingkungan strategis dari 4 (empat) Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian,

serta mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat di bidang aparatur maka isu-isu strategis ditingkat Pemerintah Pusat atau nasional yang terkait dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- a. Optimalisasi pengelolaan informasi kepegawaian;
- b. Penataan ASN sesuai dengan formasi;
- c. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan;
- d. Pelaksanaan mutasi, promosi dan pengembangan karier sesuai dengan pola karier dan formasi PNS;
- e. Optimalisasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi aparatur;
- f. Teridentifikasinya kesenjangan kompetensi aparatur;
- g. Optimalisasi penegakan disiplin, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; dan
- h. Peningkatan tata kelola dan kinerja BKPSDM.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 1(satu) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh BKPSDM untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2026.

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BKPSDM Kabupaten Kutai

Kartanegara dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara.

Sasaran dari tujuan tersebut yaitu : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah.

Tujuan dan sasaran renja BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III-1

**Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022**

| TUJUAN | SASARAN | | TARGET RENJA TAHUN 2022 |
|--|---|---|-------------------------|
| | URAIAN | INDIKATOR | |
| [1] Meningkatnya Profesionalitas ASN Kutai Kartanegara | | | 61 |
| | [1] Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah | [2] Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM | B (80) |
| | [2] Meningkatnya Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional Sumber Daya Aparatur Sipil Negara | [3] Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional | 18,38 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah.
3. Penguatan manajemen kinerja BKPSDM
4. Penyelenggaraan pengembangan PNS berdasarkan analisis kebutuhan.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2022 ini, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 19.982.806.535,00.

Kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 sebagian besar dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Tenggarong, kecuali untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN, Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum dan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan yang dilaksanakan di luar Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain di Samarinda bekerja sama dengan LAN Samarinda dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Jakarta.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 difokuskan untuk mendukung program kerja Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam program dedikasi KUKAR IDAMAN. Dalam upaya mendukung program dedikasi tersebut, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat amanat untuk melaksanakan Program Aparatur Negara Bahagia dan Program Digitalisasi Pelayanan Publik.

Program Aparatur Negara Bahagia merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN untuk abdi negara di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

agar dapat memiliki jaminan hari tua dan tambahan pendapatan melalui pemanfaatan keanggotaan KORPRI dengan menangkap peluang usaha dibawah manajemen KOPERASI ASN KUKAR yang profesional dan produktif. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Non PNS (THL dan THS), Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, dan Ketua RT. Dalam program ini BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat amanat untuk merevitalisasi Koperasi ASN Panca Prasetya dan memastikan keberadaan koperasi ASN eksis, aktif dan produktif di seluruh Kab. Kutai Kartanegara.

Selanjutnya BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara juga diberi amanat sebagai salah satu perangkat daerah yang mengampu Program Digitalisasi Pelayanan Publik yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Dalam program ini peranan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menempatkan aparatur sesuai kebutuhan perangkat daerah sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Tabel IV-1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | |
|---------------------|---|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | UNSUR PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN | | | | | | | | |
| 5.03.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Sakip Perangkat Daerah | | 85 Nilai | 13.622.806.535,00 | | | 86 Nilai | 16.145.931.788,00 |
| 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 24 dokumen | 145.000.000,00 | | | 23 dokumen | 145.000.000,00 |
| 5.03.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Kutai Kartanegara | 7 dokumen | 50.000.000,00 | APBD | | 6 dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.03.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Kutai Kartanegara | 15 dokumen | 45.000.000,00 | APBD | | 15 dokumen | 45.000.000,00 |
| 5.03.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Kutai Kartanegara | 2 dokumen | 50.000.000,00 | APBD | | 2 dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel | | 15 laporan | 10.544.641.295,00 | | | 15 laporan | 13.042.766.548,00 |
| 5.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan | Kab. Kutai Kartanegara | 1080 ASN/bulan | 10.344.641.295,00 | APBD | | 1296 ASN/bulan | 12.792.766.548,00 |
| 5.03.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Kutai Kartanegara | 1 laporan | 50.000.000,00 | APBD | | 1 laporan | 50.000.000,00 |
| 5.03.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab. Kutai Kartanegara | 12 laporan | 150.000.000,00 | APBD | | 12 laporan | 200.000.000,00 |
| 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah | | 2 Dokumen | 45.000.000,00 | | | 2 Dokumen | 45.000.000,00 |
| 5.03.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi | Kab. Kutai Kartanegara | 2 laporan | 45.000.000,00 | APBD | | 2 laporan | 45.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------------------|----------------|------------------|------|--|----------------|------------------|
| 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian | | 1 dokumen | 50.000.000,00 | | | 1 dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.03.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan | Kab. Kutai Kartanegara | 0 unit | - | APBD | | unit | 0,00 |
| 5.03.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kab. Kutai Kartanegara | 50 Orang | 50.000.000,00 | APBD | | 50 Orang | 50.000.000,00 |
| 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 7 Layanan | 1.055.000.000,00 | | | 7 Layanan | 1.055.000.000,00 |
| 5.03.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Kab. Kutai Kartanegara | 1 paket | 150.000.000,00 | APBD | | 1 paket | 150.000.000,00 |
| 5.03.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Kab. Kutai Kartanegara | 4500 porsi | 150.000.000,00 | APBD | | 4500 porsi | 150.000.000,00 |
| 5.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Kab. Kutai Kartanegara | 317439 lembar | 200.000.000,00 | APBD | | 317439 lembar | 200.000.000,00 |
| 5.03.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan | Kab. Kutai Kartanegara | 1277 exemplar | 15.000.000,00 | APBD | | 1277 exemplar | 15.000.000,00 |
| 5.03.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi | Kab. Kutai Kartanegara | 5 Orang/kali | 125.000.000,00 | APBD | | 5 Orang/kali | 125.000.000,00 |
| 5.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Kab. Kutai Kartanegara | 100 Orang/kali | 315.000.000,00 | APBD | | 100 Orang/kali | 315.000.000,00 |
| 5.03.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada Unit Kearsipan (UK) | Kab. Kutai Kartanegara | 450 berkas | 100.000.000,00 | APBD | | 450 berkas | 100.000.000,00 |
| 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100 Persen | 387.750.000,00 | | | 100 Persen | 387.750.000,00 |
| 5.03.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan | Kab. Kutai Kartanegara | 1 paket | 287.750.000,00 | APBD | | 1 paket | 287.750.000,00 |
| 5.03.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan | Kab. Kutai Kartanegara | 1 paket | 100.000.000,00 | APBD | | 1 paket | 100.000.000,00 |
| 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | | 12 bulan | 1.095.415.240,00 | | | 12 bulan | 1.095.415.240,00 |
| 5.03.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat Menyurat | Kab. Kutai Kartanegara | 12 bulan | 22.000.000,00 | APBD | | 12 bulan | 22.000.000,00 |
| 5.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Kutai Kartanegara | 12 bulan | 146.000.000,00 | APBD | | 12 bulan | 146.000.000,00 |
| 5.03.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Kutai Kartanegara | 12 bulan | 100.000.000,00 | APBD | | 12 bulan | 100.000.000,00 |
| 5.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS | Kab. Kutai Kartanegara | 12 Bulan | 827.415.240,00 | APBD | | 12 Bulan | 827.415.240,00 |
| 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah | | 12 unit | 300.000.000,00 | | | 12 unit | 325.000.000,00 |
| 5.03.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak | Kab. Kutai Kartanegara | 12 unit | 300.000.000,00 | APBD | | 12 unit | 325.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------------------|-----------|-----------------------|------------------|------|--|-----------|-----------------------|------------------|
| 5.03.02 | Program Kepegawaian Daerah | 1. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | | 34 | Jabatan | 3.640.000.000,00 | | | 34 | Jabatan | 3.615.000.000,00 |
| | | 2. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | | 5304 | Jabatan | | | | 5158 | Jabatan | |
| | | 3. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi | | 6164 | Jabatan | | | | 5873 | Jabatan | |
| | | 4. Rasio pegawai fungsional | | 50 | Persen | | | | 52,00 | Persen | |
| | | 5. Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar | | 34 | Persen | | | | 37 | Persen | |
| | | 6. Persentase Bezetting dalam pengisian formasi | | 95,00 | Persen | | | | 95,00 | Persen | |
| | | 7. Persentase layanan administrasi pemberhentian ASN dan fasilitasi profesi ASN yang selesai sesuai SOP | | 95,00 | Persen | | | | 95,00 | Persen | |
| | | 8. Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian mutakhir | | 95,00 | Persen | | | | 95,92 | Persen | |
| | | 9. Persentase layanan Mutasi dan Promosi yang selesai sesuai SOP | | 85,00 | Persen | | | | 85,00 | Persen | |
| | | 10. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi | | 13,23 | Persen | | | | 13,23 | Persen | |
| | | 11. Persentase Tingkat capaian kinerja PNS di atas 76 | | 95,00 | Persen | | | | 95,00 | Persen | |
| | | 12. Persentase Pelanggaran Disiplin PNS yang diselesaikan | | 90,00 | Persen | | | | 90,00 | Persen | |
| | | 13. Persentase Layanan Tanda Jasa dan Izin Perceraian yang selesai | | 80,00 | Persen | | | | 80,00 | Persen | |
| 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Cakupan Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | 100 | Persen | 1.425.000.000,00 | | | 100 | Persen | 1.375.000.000,00 |
| 5.03.02.2.01.02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah dokumen Kebutuhan ASN yang disusun | Kab. Kutai Kartanegara | 1 | dokumen | 75.000.000,00 | APBD | | 1 | dokumen | 75.000.000,00 |
| 5.03.02.2.01.03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Formasi ASN | Kab. Kutai Kartanegara | 276 | formasi | 450.000.000,00 | APBD | | 276 | formasi | 450.000.000,00 |
| 5.03.02.2.01.06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN | Jumlah SK Pensiun dan SK Pemberhentian ASN | Kab. Kutai Kartanegara | 500 | SK | 100.000.000,00 | APBD | | 523 | SK | 100.000.000,00 |
| 5.03.02.2.01.08 | Fasilitasi lembaga profesi ASN | Jumlah Layanan Profesi ASN Jumlah laporan | Kab. Kutai Kartanegara | 1142 2 | fasilitasi laporan | 500.000.000,00 | APBD | | 1142 2 | fasilitasi laporan | 450.000.000,00 |
| 5.03.02.2.01.10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah pengembangan aplikasi SIMPEG Jumlah laporan | Kab. Kutai Kartanegara | 1 0 | Aplikasi laporan | 100.000.000,00 | APBD | | 1 0 | Aplikasi laporan | 100.000.000,00 |
| 5.03.02.2.01.11 | Pengelolaan data Kepegawaian | Jumlah data kepegawaian yang diupdate | Kab. Kutai Kartanegara | 2972 | data | 100.000.000,00 | APBD | | 2590 | data | 100.000.000,00 |
| 5.03.02.2.01.12 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah dokumen evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Kab. Kutai Kartanegara | 1 | dokumen | 100.000.000,00 | APBD | | 1 | dokumen | 100.000.000,00 |
| 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | Cakupan Layanan Mutasi dan Promosi ASN | | 100 | Persen | 600.000.000,00 | | | 100 | Persen | 625.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------------------|-------|------------|------------------|------|--|-------|------------|------------------|
| 5.03.02.2.02.01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah fasilitasi layanan mutasi ASN | Kab. Kutai Kartanegara | 460 | fasilitasi | 200.000.000,00 | APBD | | 516 | fasilitasi | 225.000.000,00 |
| 5.03.02.2.02.02 | Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN | Jumlah layanan kenaikan pangkat ASN | Kab. Kutai Kartanegara | 2150 | SK | 200.000.000,00 | APBD | | 2150 | SK | 200.000.000,00 |
| 5.03.02.2.02.03 | Pengelolaan promosi ASN | Jumlah rapat promosi ASN | Kab. Kutai Kartanegara | 15 | rapat | 200.000.000,00 | APBD | | 15 | rapat | 200.000.000,00 |
| 5.03.02.2.03 | Pengembangan kompetensi ASN | Cakupan Layanan Pengembangan Kompetensi ASN | | 100 | Persen | 1.075.000.000,00 | | | 100 | Persen | 1.075.000.000,00 |
| 5.03.02.2.03.01 | Peningkatan kapasitas kinerja ASN | Jumlah peserta yang mengikuti UD dan PI | Kab. Kutai Kartanegara | 380 | peserta | 350.000.000,00 | APBD | | 380 | peserta | 350.000.000,00 |
| 5.03.02.2.03.02 | Pengelolaan Assesment Center | Jumlah peserta yang mengikuti assesment/ujian | Kab. Kutai Kartanegara | 80 | peserta | 350.000.000,00 | APBD | | 80 | peserta | 350.000.000,00 |
| 5.03.02.2.03.04 | Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan tugas belajar dan izin belajar | Kab. Kutai Kartanegara | 100 | ASN | 375.000.000,00 | APBD | | 100 | ASN | 375.000.000,00 |
| 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Cakupan Layanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | 100 | Persen | 540.000.000,00 | | | 100 | Persen | 540.000.000,00 |
| 5.03.02.2.04.01 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah dokumen | Kab. Kutai Kartanegara | 1 | dokumen | 100.000.000,00 | APBD | | 1 | dokumen | 100.000.000,00 |
| 5.03.02.2.04.02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah dokumen | Kab. Kutai Kartanegara | 12377 | dokumen | 125.000.000,00 | APBD | | 12377 | dokumen | 125.000.000,00 |
| 5.03.02.2.04.03 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah dokumen Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Kutai Kartanegara | 1 | dokumen | 75.000.000,00 | APBD | | 1 | dokumen | 75.000.000,00 |
| 5.03.02.2.04.08 | Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan | Kab. Kutai Kartanegara | 15 | kasus | 100.000.000,00 | APBD | | 15 | kasus | 100.000.000,00 |
| 5.03.02.2.04.05 | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai | Jumlah PNS penerima Tanda Jasa | Kab. Kutai Kartanegara | 348 | PNS | 90.000.000,00 | APBD | | 348 | PNS | 90.000.000,00 |
| 5.03.02.2.04.09 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah permohonan izin perceraian pegawai yang diselesaikan | Kab. Kutai Kartanegara | 35 | surat | 50.000.000,00 | APBD | | 35 | surat | 50.000.000,00 |
| | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | | | |
| 5.04.02 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | | 8,55 | jam | 2.720.000.000,00 | | | 12,22 | jam | 2.000.000.000,00 |
| | | 2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | | 10,23 | Persen | | | | 14,63 | Persen | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------------------|-------|---------|--------------------------|------|-------|---------|--------------------------|
| | | 3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | | 66,85 | Persen | | | 73,83 | Persen | |
| | | 4. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi | | 81,85 | Persen | | | 85,87 | Persen | |
| | | 5. Persentase ASN yang mengikuti diklat prajabatan | | 100 | Persen | | | 100 | Persen | |
| 5.04.02.2.01 | Pengembangan kompetensi Teknis | Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis | | 210 | ASN | 420.000.000,00 | | 200 | ASN | 400.000.000,00 |
| 5.04.02.2.01.03 | Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum | Jumlah peserta | Kab. Kutai Kartanegara | 210 | peserta | 420.000.000,00 | APBD | 200 | peserta | 400.000.000,00 |
| 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional | Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan Jumlah ASN yang mengikuti diklat prajabatan | | 120 | ASN | 2.300.000.000,00 | | 106 | ASN | 1.600.000.000,00 |
| 5.04.02.2.02.07 | Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan | Jumlah peserta | Kab. Kutai Kartanegara | 120 | peserta | 2.300.000.000,00 | APBD | 106 | peserta | 1.600.000.000,00 |
| | JUMLAH | | | | | 19.982.806.535,00 | | | | 21.760.931.788,00 |

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kab. Kukar.

Jika dalam pelaksanaan program dan kegiatan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilakukan upaya rasionalisasi anggaran kegiatan dengan memperhatikan skala prioritas. Berkaitan dengan kaidah pelaksanaan, Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BKPSDM Kab. Kukar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, serta menjaga konsistensi antara Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja BKPSDM Kab. Kukar Tahun 2022 adalah akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2022 dengan memperhatikan saran, informasi dan data-data dari masing-masing bidang untuk melakukan penyempurnaan sehingga mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun di lingkup daerah.

Tenggarong, 16 Juli 2021

Pt. Kepala BKPSDM Kab. Kukar



H. RAKHMADI, S.Sos

PEMBINA

NIP. 19660107 200012 1 003